

# PENGEMBANGAN WAWASAN NUSANTARA MENUJU KETAHANAN NASIONAL

Armaidly Armawi

*Banyak negara di dunia yang telah mencapai kemerdekaan ratusan tahun, tetapi tidak pernah menjadi negara industri bahkan tetap menyandang predikat sebagai negara berkembang. Sebaliknya ada negara-negara yang merdeka dalam usia sangat muda tetapi perkembangannya sangat pesat, dan termasuk negara industri. Pendidikan bagi suatu bangsa tidak dapat dipandang sepele, sebab melalui pendidikan akan terbentuk elemen kehidupan bangsa yang memiliki nilai ketahanan. Sebaliknya, kelemahan bidang pendidikan dapat menyebabkan bangsa tersebut menjadi miskin dan sulit untuk maju.*

*Kondisi ini makin berat ketika berbagai negara di dunia mengalami krisis moneter dan ekonomi, kemudian menimbulkan krisis kepercayaan baik di dalam maupun luar negeri terhadap pemerintah. Negara bangsa (nation state) yang memiliki pluralitas sangat tinggi seperti Indonesia tengah ditantang untuk menghadapi persoalan disintegrasi bangsa. Apabila bangsa dan negara tidak memiliki pemahaman akan wawasan nasional (national outlook), nilai ketahanan nasional yang mampu untuk menghadapi dan mengatasi dinamika global tersebut, maka dampaknya sangat besar terhadap upaya menciptakan integrasi nasional.*

## **Dinamika Lingkungan Stra- tegis**

Kemajuan yang pesat di bidang teknologi informasi telah memungkinkan bangsa-bangsa

di dunia lebih mudah bersentuhan dengan dunia luar. Perubahan mendasar yang bergerak dari persoalan moneter yang telah menimbulkan krisis eko-

---

\*) Dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada

nomi di berbagai negara termasuk Indonesia, kemudian menimbulkan krisis kepercayaan kepada pemerintah yang terjadi di dalam maupun luar negeri, telah menimbulkan persoalan berbangsa dan bernegara yang makin berat. Keadaan tersebut telah membawa dampak yang tidak kecil terhadap mobilitas gerakan regionalisme dan juga makna nasionalisme bagi bangsa-bangsa di dunia. Di satu pihak mobilitas tersebut menjadi pemicu gerakan regionalisme dan menipisnya makna serta cakupan nasionalisme yang pada akhirnya dapat mengganggu atau mengancam integrasi nasional. Kasus yang menimpa Ethiopia, Somalia, Irak, Libanon, Sri Lanka. Bekas negara Yugoslavia dan Uni Soviet serta Quebec di Kanada merupakan contoh ketidakmampuan bangsa dan negara bersangkutan dalam menangani berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakatnya, sehingga telah menimbulkan berbagai gejolak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berada pada posisi sangat rentan terhadap disintegrasi.

Kebhinekaan ras, agama, kultur dan etnik sebagai lawan homogenitas dalam suatu negara biasanya dilihat sebagai faktor negatif yang merugikan negara tersebut. Gejolak sosial dan in-

stabilitas politik yang selama ini ditunjukkan oleh banyak negara di Asia dan Afrika sejak berakhirnya Perang Dunia II seolah-olah telah menjadi kutukan bagi negara tersebut, karena bersamaan dengan berdirinya negara semacam itu terjadi perang saudara berkepanjangan, kesengsaraan ekonomi, tragedi politik dan bahkan tidak jarang juga gerakan pembersihan etnis (*genocide*). Tradisi dan warisan budaya, agama dan persaingan wilayah dalam rangka penguasaan sumber-sumber ekonomi, serta sentimen etnisitas dan keadaan yang telah melekat kuat semakin menonjolkan penampilan perbedaan-perbedaan tersebut. Apalagi ketika ideologi kapitalis dan komunis diadopsi oleh para elit-politik mereka dalam rangka merespon perang dingin yang mendunia, maka perbedaan dan heterogenitas yang berarti perang saudara dan kekejaman yang berkepanjangan yang akhirnya memupus sejumlah harapan masa depan masyarakatnya.

Nasionalisme di banyak negara yang baru merdeka, ironisnya justru berkembang dari primordial *attachment* yang diikat secara paksa menjadi satu kesatuan oleh pemerintah kolonial. Dengan demikian, nasionalisme yang muncul kemudian setelah kemerdekaan melekat

pada pluralisme primordial, Pergeseran loyalitas pada negara sebagai perwujudan dari suatu negara bangsa (*nation state*) sedikit banyak mengandung elemen keharusan sejarah (*historical necessitate*) yang melekat pada kolonialisme. Jika keadaan ini dibiarkan akan merupakan bibit persoalan yang dapat mengganggu integritas nasional, seperti merebak dan menguatnya perasaan tidak puas, kecemburuan sosial, yang memperkuat sentimen sempit seperti rasa kesukuan, agama, ras dan regionalisme yang pada gilirannya menjadi bibit disintegrasi bangsa dan negara.

### **Kebhinekaan dan Wawasan Nusantara**

Bagi Indonesia yang memiliki pluralitas etnik, agama, budaya, dan lainnya yang sangat tinggi tidak luput dari sejumlah persoalan yang mengganggu baik saat ini maupun masa depan. Di Indonesia, kebhinekaan atau heterogenitas merupakan faktor yang sangat diperhitungkan sejak awal berdirinya negara. Elemen ini berkaitan dengan apa yang disebut oleh Clifford Geertz sebagai *primordial sentiment* sebagai lawan dari *civil politics*. *Primordial sentiment* atau *attachments* adalah sifat budaya dan tingkah laku politik pada suku (*tribe*), daerah (*region*), agama,

kelompok etnik dan pengelompokan-pengelompokan sejenisnya yang bersifat "*given*". Hal ini dalam banyak hal justru telah menjadi dasar yang kuat dari suatu kekuasaan dan identitas karena mempunyai sifat pasti dan *instant*. Dalam ikatan-ikatan sosial semacam ini, kehidupan politik kenegaraan dipandang sebagai persoalan keluarga, sementara kekuasaan dan identitas pribadi atau kelompok dilihat sebagai sesuatu yang abstrak dan tidak menentukan. Keadaan ini kontras sekali dengan *civil politics* yang memandang kinerja (*performances* dan prestasi (*merit*) bukan hubungan keluarga lebih penting sebagai pertimbangan.

Masyarakat yang sarat dengan *primordial sentiment* menurut Geertz memerlukan suatu *integrative revolution* yaitu suatu gerak integrasi masyarakat ke dalam ikatan-ikatan kultural yang lebih luas dan mendukung pemerintahan nasional. Tanpa gerak integrasi ini, bila timbul sedikit saja kekecewaan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan (*sara*) akan meningkatkan potensi meledaknya disintegrasi politik. Dalam hal ini, kemampuan gerak integrasi suatu bangsa dapat diartikan sama dengan pema-haman tentang wawasan nasional, dan semakin tinggi gerak

integrasinya semakin tinggi pula tingkat pemahaman mengenai wawasan nasional. Dalam konteks keIndonesiaan wawasan nasional itulah yang disebut dengan wawasan Nusantara.

Selanjutnya, integrasi nasional sebagai produk dari tingkat pemahaman wawasan nasional atau wawasan Nusantara yang tinggi berarti telah terciptanya suatu identitas bersama sebagai suatu bangsa. Sementara integrasi teritorial di bawah satu kesatuan administrasi adalah syarat utama bagi integrasi nasional, tetapi ini tidak berarti bahwa terlaksananya integrasi teritorial sama dengan terjaminnya integrasi nasional (politik).

Kesenjangan antara integrasi politik dan integrasi teritorial pada saat-saat tertentu tampak nyata. Suatu masyarakat yang di satu sisi telah menerima kenyataan adanya kekuasaan administratif negara, di sisi lain masyarakat tersebut tetap enggan memberikan loyalitas terakhirnya (*ultimate loyalty*). Dengan demikian, integrasi nasional yang utuh dapat diartikan sebagai suatu pergeseran loyalitas masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih luas yang termanifestasi pada rasa, ikut serta (*sharing*) memiliki kedaulatan. Pertalian keluarga atau kekerabatan (*kinship*), persamaan daerah asal (*region*)

ataupun identitas etnis tidak lagi sebagai sumber utama dari status dan bentuk tertinggi loyalitas, melainkan individu-individu anggota masyarakat mulai berusaha menemukan kesempatan untuk dapat loyal pada komunitas yang lebih besar yaitu bangsa atau *nation*. Ini diikuti dengan munculnya institusi-institusi tertentu sehingga bentuk-bentuk abstrak dari bangsa (*nation*) berubah menjadi konkrit dalam bentuk misalnya, institusi pendidikan, dewan-dewan perwakilan, partai politik dan tentara nasional. Partisipasi dalam institusi-institusi semacam itu memberikan kesempatan pada rakyat banyak untuk bekerja bersama mencapai tujuan sosial tertentu yang biasanya berada di luar kemampuan kerabat atau kelompok etnisnya secara sendiri-sendiri. Meningkatnya aktivitas institusi-institusi ini berakibat pada peningkatan kesejahteraan dan kekayaan nasional, sehingga kedaulatan suatu bangsa menjadi realita dalam bentuk maupun kenyataan. Pemerintah nasional kemudian memiliki segala macam otorita dan dana untuk memaksakan loyalitas dan kemampuan untuk memberi ganjaran dan hadiah bagi mereka yang loyal atau menghukumnya bagi yang berbuat sebaliknya.

## Ketahanan Nasional

Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Untuk mewujudkan ketahanan nasional diperlukan sistem penangkalan berlapis. Sistem ini berupa lingkaran-lingkaran yang berpusat pada ketahanan pribadi tiap individu warga masyarakat, ketahanan daerah atau wilayah, dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional mulai retak-retak oleh ketidakadilan pusat-daerah, ketidakadilan religius, serta ketidakadilan di kalangan swasta dan kalangan birokrasi. Lapisan tipis teratas menguasai harta milik terbesar dan hidup dalam *enclave* kemewahan dengan hedonisme Amerika. Juga terdapat ketidakadilan kultural dan edukasional (Jacob, 1999). Dalam hal ini, terwujudnya ketahanan nasional selalu menuntut perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, sehingga memiliki nilai keuletan dan ketangguhan bagi kelangsungan hidup negara nasional.

Ketahanan nasional Indonesia berkembang menurut kebutuhan yang sesuai dengan kondisi lingkungan strategis. Pendekatan ketahanan nasional Indonesia, dikembangkan berdasar-

kan Asta Gatra yang berada dalam suatu medan interaksi yang saling berpengaruh, tetapi juga saling mendukung. Akar ketahanan nasional Indonesia sesungguhnya berada pada tataran "mentalitas" dan "karakter" bangsa Indonesia sendiri. Sulit untuk dilihat tetapi selalu muncul ke permukaan setiap saat. Mentalitas dan karakter inilah yang menentukan perilaku positif atau negatif dalam memahami persoalan berbangsa dan bernegara secara lebih arif yang melibatkan berbagai elemen kehidupan nasional.

Untuk itu memahami ketahanan nasional Indonesia kini dan masa depan sangat ditentukan oleh mentalitas dan karakter bangsa, dan sekarang tengah mengalami proses untuk melahirkan entitas baru bagi *nation state* Indonesia. Upaya ke arah untuk mewujudkan identitas baru tersebut, maka diperlukan *national and character building* yang lebih matang. Dalam hal ini yang dianggap menentukan nilai ketahanan tersebut yaitu pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Banyak contoh menunjukkan bahwa, melalui kemajuan pendidikan suatu bangsa dan negara dapat mencapai kemajuan-kemajuan yang pesat. Begitu juga kegagalan dalam mengelola bidang pendidikan

dapat membuat suatu bangsa dan negara tidak pernah mencapai kemajuan.

Realitas di Indonesia dengan tingkat pluralitas yang tinggi, akan merupakan tantangan yang perlu dijawab melalui kemajuan pendidikan. Untuk itu ke depan, politik pendidikan akan memasuki arena penting karena terkait langsung maupun tidak langsung dengan upaya menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas bagi bangsa dan negara. Pendidikan perlu dipacu untuk mewujudkan sebuah bangsa yang ulet dan tangguh, sehingga pengembangan ketahanan pendidikan menjadi agenda penting untuk pengembangan lebih lanjut. Pengembangan ketahanan pendidikan ini merupakan suatu proses *national and character building* secara matang yang pada gilirannya akan menghasilkan bangsa yang ulet dan tangguh. Berbagai eskalasi ancaman yang muncul dari dalam maupun yang datangnya dari luar akan mampu diatasi oleh bangsa ini secara arif tanpa harus mengorbankan kepentingan orang lain untuk mencapai kepentingan diri sendiri.

Persoalan ini akan menjadi lebih penting lagi karena menghadapi dinamika masyarakat di era global yang menghendaki kompetensi di berbagai bidang. Ini niscaya menuntut bangsa dan

negara Indonesia agar memiliki nilai ketahanan nasional yang benar-benar ulet dan tangguh. Apabila hal ini tidak dapat dilakukan untuk mengantisipasi semua perkembangan yang terjadi, mungkin saja dapat menimbulkan persoalan berbangsa dan bernegara yang lebih berat di masa depan.

### **Refleksi Filosofis terhadap Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional**

Ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Negara merupakan wadah yang mempersatukan bangsa secara konkrit, dan merupakan pula institusi tertinggi yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga mereka dapat mengcmbangkan perikehidupan sesuai dengan hakikat dan martabat serta kepribadian nasionalnya.

Pemahaman terhadap wawasan nusantara dan ketahanan nasional akan berada dalam kondisi yang lemah jika tidak terdapatnya suatu kondisi rasa keadilan disegenap aspek sistem kehidupan nasional, yaitu Asta Gatra. Karena unsur keadilan merupakan esensi dalam kehidupan manusia. Oleh karena

itu, keadilan merupakan suatu prasyarat terselenggaranya cita negara persatuan dan menegakkan sistem pemerintahan yang demokratis yang terwujud dalam bentuk musyawarah untuk mencapai mufakat. Keadilan sosial oleh penyusun Undang-Undang Dasar 1945 dikualifikasikan sebagai protes bangsa Indonesia yang maha hebat kepada dasar individualisme.

Keadilan sebagai daya hidup manusia merupakan esensi hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, keadilan dapat dipandang sebagai suatu nilai. Nilai adalah segi dari suatu fakta yang berdasarkan fakta itu terlihat mengandung sifat dasarnya, alasannya memadai bagi keberadaan sebagai suatu fakta tetap demikian itu, atau alasan yang memadai bagi kedudukan yang dianggap sebagai tujuan untuk keperluan praktik (Craeken, 1950). Keadilan yang dimaksud tergolong sebagai nilai sosial. Nilai sosial adalah arti objektif dari suatu gejala bagi anggota-anggota sebuah kelompok manusia dan arti objektif tersebut menjadi sasaran aktivitas bagi anggota-anggota kelompok itu (Hoult, 1969). Keadilan pada suatu sisi berkaitan erat dengan aneka perserikatan manusia dalam suatu kolektiva, dan pada

sisi lain mencakup pula pelbagai kebijakan perseorangan (individu) yang didambakan dalam kehidupan manusia.

Keadilan juga sebagai suatu nilai yang bersifat intrinsik. Nilai intrinsik bertalian erat dengan pengalaman sifat baik atau bernilai dalam hal itu sendiri sebagai suatu tujuan demi pengalaman itu sendiri (Runes, 1975). Ini menjadi tujuan yang disepakati bersama oleh anggota-anggota suatu masyarakat serta diupayakan pencapaian demi keadilan itu sendiri. Keadilan, dalam kualitasnya sebagai *the very intrinsic value of man*, mempunyai makna bahwa keadilan sebagai daya hidup manusia (*the basic force of man*). Pengertian keadilan yang bersifat komprehensif-integral dapat dinyatakan sebagai kondisi keseimbangan antara kewajiban dan hak.

Persoalan keadilan ini dalam ideologi Pancasila dituangkan ke dalam dua buah sila, dalam sila "kemanusiaan yang adil dan beradab" dan dalam sila kelima "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Ini bukan suatu kebetulan kalau kata "adil" mendahului kata "makmur" di dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam konsep keadilan tersebut terkandung keadilan sebagai moralitas dan keadilan sebagai kondisi. Artinya, keadilan se-

bagai kondisi hidup manusia itu, keadilan menjadi sesuatu yang begitu substansial bagi kehidupan manusia. Pengalaman menunjukkan bahwa ternyata musuh bangsa Indonesia yang terpenting dan terutama adalah kondisi "ketidakadilan sosial", karena kondisi ini akan menggerakkan "perang pembebasan" atau revolusi sosial yang didukung oleh rakyat. Hal-hal yang berhubungan dengan kepincangan dan kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi yang kondusif untuk terjadinya setiap bentuk subversif (Nasution, 1979).

Terciptanya kondisi rasa keadilan tidak perlu menunggu sampai kemakmuran tercapai. Dalam situasi kemiskinan yang papa dan hina sekalipun, rasa keadilan atau ketidakadilan sangat mempengaruhi kondisi, semangat, dan sikap manusia. Kemakmuran pada hakikatnya bukan sekedar penambah (penjumlahan), tetapi merupakan proses integrasi berbagai aspek material masyarakat yang disesuaikan dengan aspek sosial masyarakat, sehingga aspek ideal masyarakat ini serasi dengan nilai-nilai transendental masyarakat (Mahzar, 1983). Kemakmuran tidak pasti menunjukkan keadilan, sampai ia bagi-bagikan secara merata, tetapi keadilan pasti akan mendatangkan rasa

kemakmuran batin, bahkan dalam keadaan kemiskinan sekalipun. Rasa keadilan sosial bukanlah sekedar dalam pengertian ekonomi atau kuantitatif, tetapi ia juga meliputi sikap, tindakan, dan suasana, sehingga ia menjamin tegaknya kepastian hukum, kebebasan menyatakan aspirasi, dan kebebasan dari rasa takut (Nasution, 1973).

Keadilan merupakan substansi rohani yang paling umum dan dalam suatu masyarakat, keadilan yang membuat dan menjaga persatuan dan kesatuan-nya. Dalam suatu masyarakat yang adil setiap orang menjalankan fungsi yang sesuai dengan sifat dasarnya, yaitu makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Dengan keadilan timbul pengaturan yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk masyarakat. Oleh karena itu, keadilan terwujud dalam masyarakat bilamana setiap anggota masyarakat melakukannya secara baik menurut kemampuan dan fungsi yang selaras baginya. Fungsi dari penguasa adalah mengalokasikan fungsi-fungsi dalam negara sesuai dengan azas keadilan dan keserasiannya.

Dalam hubungan ini, Socporno mengatakan menurut sifat tatanegara Indonesia yang asli yang tergambar dalam suasana



desa-desa yang ada di kepulauan Nusantara (*archipelago state*), pemimpin-pemimpinnya bersatu jiwa dengan rakyatnya dan senantiasa wajib memegang teguh persatuan dan keseimbangan dalam masyarakatnya. pemimpin berkewajiban untuk menyelenggarakan keinsyafan (kesadaran) keadilan rakyat, memberi bentuk (*Gestaltung*) kepada rasa keadilan dan cita-cita rakyat. Pemimpin senantiasa memperhatikan segala gerak-gerik (aspirasi) dalam masyarakat dan untuk maksud itu senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya, agar pertalian batin antara pemimpin dan rakyat seluruhnya senantiasa terpelihara dalam suasana persatuan antara pemimpin dan rakyatnya antara golongan-golongan rakyat satu sama lain yang diliputi oleh semangat gotong-royong dan kebersamaan (Yamin, 1971).

Oleh karena itu, keadilan dalam masyarakat dapat dicapai dengan jalan mendorong anggota-anggotanya bertindak adil. Para pelaku keadilan ini tentu akan mengembalikan pada masyarakat apa yang lebih dari haknya dan para pemimpin masyarakat wajib mendistribusikan kelebihan itu pada anggota-anggotanya yang haknya tidak terpenuhi. Dengan demikian, prinsip keadilan itu dihayati se-

cara moral dan dialami sebagai kondisi nyata.

Keadilan juga mempunyai sumber dan pembedaan dalam perintah Tuhan, karena keadilan merupakan salah satu sistem dan hukum-Nya yang utama. Oleh karena itu, prinsip keadilan juga merupakan gagasan umum yang mendasari eksistensi alam semesta. Melaksanakan dan memelihara keadilan di bumi merupakan prasyarat bagi kebahagiaan umat manusia. Dalam sistem yang berorientasi kepada Tuhan Yang Maha Esa, keadilan merupakan azas yang sangat penting. Dengan demikian, sesuatu yang dapat dikatakan orisinal dan khas ideologi Pancasila yang dianut bangsa dan negara Indonesia adalah penetapan sila "*Ketuhanan Yang Maha Esa*" sebagai prinsip moral transendental yang membimbing dan mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara menurut dasar "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*".

Apabila dikaji lebih dalam, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sangat sarat dengan prinsip-prinsip keadilan yang dalam hal ini adalah nilai-nilai keadilan sosial. Oleh karena itu, keadilan merupakan suatu prasyarat untuk terselenggaranya citanegara persatuan dalam menegakkan sistem pemerintahan yang demokratis yang terwu-

jud dalam bentuk musyawarah untuk mencapai mufakat. "Ketahanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab" menunjukkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa amanatkan kepada manusia sebagai makhluk individu berwatak adil, sedangkan "beradab" merupakan pelaksanaan keadilan dalam kualitas manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, jelas bahwa pandangan Pancasila mengenai manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, yang di dalamnya terkandung pengakuan adanya relasi saling tergantung antar sesama.

Berhubung dengan hal di atas, Soepomo menyatakan pengertian negara sebagai persatuan bangsa Indonesia yang tersusun atas sistem hukum, di mana negara akan berwujud dan bertindak sebagai penyelenggara keinsyafan keadilan rakyat seluruhnya, maka akan dapat melaksanakan negara Indonesia yang bersatu dan adil. Hal ini juga dinyatakan oleh Hatta bahwa keadilan sosial menjadi dasar dan sekaligus tujuan yang harus dilaksanakan oleh negara dan bangsa Indonesia. Dengan demikian, isi dan cakupan dari keadilan yang terkandung di dalam ideologi Pancasila mengacu pada daya hidup manusia (*the basic force of*

*man*).

### Strategi Pengembangan Ketahanan Nasional Indonesia

Secara filosofis, teori yang dekat dengan ketahanan nasional bagi suatu negara sudah cukup lama dikembangkan oleh para ilmuwan di berbagai negara melalui teori geopolitik, geostrategi dan *national power*. Secara konseptual penerapan teori tersebut di setiap negara berbeda-beda, karena hal itu terkait dengan dinamika lingkungan strategis, kehidupan sosio-kultural, dan lainnya sehingga pendekatan yang digunakan oleh setiap negara sangat berbeda. Tidak otomatis bahwa setiap pendekatan selalu cocok pada semua negara. Inilah yang menjadi dasar pemikiran dikembangkannya wawasan nusantara dan ketahanan nasional Indonesia.

Kondisi keadilan dan ketidakadilan sosial sangat berpengaruh terhadap pemahaman tentang wawasan nusantara dan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keadilan sebagai nilai intrinsik yang teralir dari daya hidup manusia mendapat tempat dan kedudukan yang utama dalam ketahanan ideologi, karena ia akan memberikan pengertian yang khas kepada wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Ketahanan ideologi

sendiri merupakan suatu kondisi kehidupan ideologik yang berkualitas memadai (*adekuat*), sehingga melalui antaraksi dengan segenap kondisi kehidupan yang lain (politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan) menghasilkan kondisi ketahanan nasional yang diinginkan. Adapun yang dimaksud dengan "*adekuat*" di sini adalah suatu berian yang jenis, kualitas, maupun kuantitasnya adalah yang memang persis dibutuhkan oleh komponen yang akan diberi. Suatu berian yang jenis, kualitas maupun kuantitasnya yang tidak sesuai, dengan sendirinya akan berdampak disfungsi terhadap komponen yang diberi.

Kondisi kehidupan ideologik itu terwujud melalui kehidupan politik atau yang disebut juga dengan politik ideologi. Menurut Easton, politik adalah penetapan alokasi nilai yang mengikat seluruh masyarakat (Budiarjo, 1977). Kehidupan politik merupakan segenap tingkah laku yang berpengaruh pada penetapan alokasi nilai dan yang telah dialokasikan. Apabila penetapan alokasi nilai memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka kualitas ketahanan nasional akan baik. Alokasi nilai politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat itu hanya

dapat terwujud apabila didasarkan dan sekaligus memadai dengan nilai-nilai intrinsik yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Oleh karena itu, kehidupan ideologi itu terwujud melalui implementasi secara nyata nilai-nilai instrinsik yang terkandung di dalam ideologi Pancasila secara konsekuen dan konsisten pada setiap penetapan alokasi nilai disegenap aspek sistem kehidupan masyarakat.

Dalam sistem kehidupan masyarakat, nilai dari tiap komponen fisik (geografi, sumberdaya manusia, dan sumberdaya alam) juga dialokasikan demi terwujudnya keadilan di bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, kondisi keadilan yang diciptakan oleh tiap nilai dari tiap komponen fisik melalui alokasi nilai yang mengikat seluruh masyarakat di segenap aspek kehidupan itu adalah identik dengan kondisi ketahanan nasional.

Pengaruh dari suatu tipe-negara, dalam hal ini "negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab" pada penyelenggaraan ketahanan nasional ialah bahwa penjabaran cita-cita nasional yang bertahap tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional keduniaan semata, melainkan

juga diimbangi dengan pertimbangan moral ketuhanan. Oleh para pendiri negara "pertimbangan rasional keduniaan" ini diamanatkan dengan "meme- gang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur", serta "me- melihara budi kemanusiaan yang luhur". Dua jenis pertim- bangan ini, oleh para pendiri negara dinyatakan sebagai ke- wajiban yang harus dilaksana- kan oleh pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (Yamin, 1971). Dengan demikian, kondi- si ketahanan nasional yang ide- al, yang memadai adalah inte- grasi dari segenap kondisi ke-adilan yang ada di segenap as-pek sistem kehidupan masyara- kat.

### Penutup

Dalam negara Republik Indo-nesia yang berdasarkan Ketu- hanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip keadilan merupakan hal yang hendaknya senantiasa ditegakkan karena keadilan adalah daya hidup manusia. Kondisi rasa keadilan merupakan tolok ukur yang konkrit bagi pemahaman ten- tang wawasan nusantara, se- hingga terwujudnya kondisi ke- tahanan nasional dalam pengert-ian kualitas dan tujuan (*in terms of quality - in terms of output*).

Lemah dan teguhnya kondisi

ketahanan nasional sangat diten- tukan oleh terpenuhinya rasa keadilan sosial, sebab "musuh utama" dari bangsa Indonesia adalah "ketidakadilan sosial" sebab kondisi yang demikian itu akan membawa implikasi yang sangat luas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemahaman terhadap wa- wasan nusantara dan kondisi ketahanan nasional erat kaitan-nya dengan adanya kondisi rasa keadilan di dalam masyarakat. Dengan demikian, pemahaman terhadap wawasan nusantara sangat berkaitan erat dengan ter- wujudnya kondisi ketahanan nasional yang terealisasi dalam bentuk integrasi kondisi keadilan disegenap aspek sistem kehi- dupan masyarakat Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Budiarjo, Meriam, 1977, *Dasar- Dasar Ilmiah Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Creeken, Dj. Mc, 1950, *Thinking and Valuing: An Introduction, Partly Historical, to the Study of the Philosophy of Value*, Macmillan. London.
- Dagobert D. Runes, 1975, *Dictionary of Philosophy*, Totawa, Little Field Adam
- Ford, Thomas, Hoult, 1969, *Dictionary of Modern Sociology*, Totawa. Littlefield Adam.

- Hatta, Moehammad, 1977, *Pengertian Pancasila*, Idayu Press, Jakarta.
- Amal, Ichlasul, Armaidly Armawi, (ed), 1998, *Regionalisme, dan Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Jacob, T, 1999, "Disintegrasi Moral Masyarakat dalam Perspektif Ketahanan Nasional", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Program Studi Ketahanan Nasional PPS-UGM, Yogyakarta.
- Mahzar, Armahedi, 1983, *Integralisnie Sebuah Rekonstruksi Filsafat Islam*, Pustaka, Bandung.
- Nasution, A.H, 1977, *Sishankamrata/Ketahanan Nasional*, Jakarta, Mimeo, Jakarta.
- , 1973, *Suatu Pemikiran Kembali Dalam Meneruskan Perjuangan Orde Baru*, Masa Baru, Bandung.
- , 1989, "Taktik dan Strategi Peperangan Klasik dan Modern di Nusantara", *Persidangan Antar Bangsa Tamadun Melayu ke-11*, Kuala Lumpur.
- Yamin, Muhammad, 1971, *Noskah Persiapan Undang-Undang Dasar Jilid 1*, Siguntang, Jakarta